

Implementasi Pemberdayaan Kolaboratif Terkait Kebijakan Perhutanan Sosial Pada Pulau-Pulau Kecil di Pulau Hiri

(Implementation of Collaborative Empowerment Related to Social Forestry Policy on Small Islands in Hiri Island)

Sabaruddin B¹, Mahdi Tamrin^{2*}, Abdul Kadir Kamaluddin³, Firlawanti Lestari Baguna⁴,
Fadila Tamnge⁵

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun

*Korespondensi : mahdi.tamrin@unkhair.ac.id

ABSTRAK

Hutan memainkan peranan krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan manusia. Namun, tantangan besar seperti deforestasi yang cepat dan pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan mengancam keberlangsungan fungsi hutan. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan perhutanan sosial di Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang melibatkan mahasiswa dan dosen dari Program Studi Kehutanan Universitas Khairun, sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan hutan berkelanjutan, khususnya dalam penyulingan minyak cengkeh, dilakukan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perhutanan sosial dan penerapan sistem agroforestri yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat dan melestarikan hutan, demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: Pemanfaatan Sumberdaya, Perhutanan Sosial, Pulau-pulau kecil

ABSTRACT

Forests play a crucial role in maintaining the balance of the ecosystem and supporting human life. However, major challenges such as rapid deforestation and unsustainable resource utilization threaten the sustainability of forest functions. This study explores the implementation of social forestry policies in Pulau Hiri District, Ternate City, North Maluku Province, as a solution to overcome this problem. Through Community Service (PKM) activities involving students and lecturers from the Forestry Study Program of Khairun University, socialization and training on sustainable forest management, especially in clove oil refining, were carried out. The results of this activity show an increase in public understanding of social forestry and the implementation of sustainable agroforestry systems. Thus, this research emphasizes the importance of collaboration between various parties in empowering communities and preserving forests, in order to achieve sustainable welfare and environmental protection.

Keywords: Resource Utilization, Social Forestry, Small Islands

PENDAHULUAN

Peran hutan dalam kehidupan manusia sangat penting. Ini karena, di samping sebagai paru-paru bumi, hutan juga berkontribusi dalam melindungi ekosistem alami serta mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya. Akan tetapi, peranan tersebut dapat terdegradasi akibat pola pemanfaatan dan pengelolaan yang

cendrung berlebihan. Belum lagi dengan adanya pola pendekatan yang cenderung antroposentris sehingga degradasi tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu (Subagiyo *et al.*, 2017).

Permasalahan hutan semakin diperparah dengan hadirnya investor-investor yang hanya ingin menggeruk hasil alam tanpa memikirkan keberlanjutan dari hutan tersebut. Menurut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara tahun 2010-2015 laju deforestasi sebesar 918.678 hektar per tahunnya di dalam Kawasan hutan. Akan tetapi, pasca 2015-2017 laju deforestasi turun signifikan 480.000 hektar pertahunnya. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa kebijakan seperti Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Sehingga berdasarkan Peraturan Presiden tersebut tercetuslah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Sesuai Permen-LHK No. 9 Tahun 2021 menjelaskan bahwa perhutanan sosial merupakan solusi dalam mengatasi ketimpangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan. Adapun tujuannya yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan menurunkan konflik kawasan hutan. Skema perhutanan sosial memuat aturan terkait Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Tak tanggung-tanggung agenda perhutanan sosial masuk dalam program prioritas pemerintah pada saat itu dengan target 12,7 juta ha lahan kawasan hutan (PPIDKLHK, 2018)

Salah satu Provinsi yang menjadi agenda prioritas perhutanan sosial yakni Provinsi Maluku Utara. Total luasan yang dimanfaatkan menjadi areal perhutanan sosial di provinsi ini yakni sebesar 298.647 ha. Luasan tersebut terbagi ke dalam kabupaten dan kota yang ada di provinsi ini (BPS Malut, 2024). Capaian luasan tersebut terbagi dalam tiga skema yakni hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat dengan jumlah penerima manfaat tersebut sebanyak 49.604 kepala keluarga (BPSKL, 2024).

Kota Ternate merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara dimana kota ini menjadi salah satu kota yang difokuskan terkait percepatan perhutanan sosial tersebut. Total luasan yang telah dikeluarkan SK untuk pemanfaatan perhutanan sosial sebesar 3.169 ha yang dikelola sebanyak 20 kelompok perhutanan sosial (KPS), luasan tersebut tersebar di berbagai pulau-pulau yang menjadi daerah administratif kota ini. Salah satu kecamatan yang ada di kota ini dan terkena dampak dari adanya Surat Keputusan tersebut yakni Kecamatan Pulau Hiri.

Secara geografis Kecamatan Pulau Hiri berada diluar dari daratan Pulau Ternate. Kecamatan ini memiliki 6 kelurahan terdiri dari Kelurahan Dorari Isa, Tafraka, Togolobe, Mado, Faudu, dan Tomajiko (BPS Kota Ternate, 2024). Diantara 6 kelurahan yang ada di Pulau Hiri hanya kelurahan Dorari Isa saja yang mendapatkan SK Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Desa. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kemudian kami melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di kelurahan tersebut. Kegiatan PKM yang kami laksanakan di Kelurahan Dorari Isa yakni Sosialisasi Pembelajaran Kolaboratif Terkait Minyak Cengkeh.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu, Oktober 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Dorari Isa Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate Maluku Utara. Tentunya dengan menggunakan data sekunder dalam mendukung kajian ini dari berbagai literatur sebagai pendekatan dan penunjang penyusunan hasil kajian kegiatan ini. Sasaran kegiatan PKM ini yakni mahasiswa Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun dan masyarakat Kelurahan Dorari Isa yang Terdaftar dalam KUPS Garamakusu. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini yakni 50 orang. Tahapan kegiatan PKM ini dimulai dengan perizinan melalui surat, keberangkatan, kemudian pelaksanaan kegiatan PKM. Adapun proses yang dilaksanakan meliputi sosialisasi terkait Perhutanan Sosial yang ada di Kecamatan Pulau Hiri, Identifikasi jenis tanaman yang dibudidayakan, dan pembelajaran terkait pembuatan minyak cengkeh. Kegiatan pengabdian ini melibatkan dosen dan mahasiswa serta Masyarakat Kelurahan Dorari Isa Pulau Hiri.



Gambar 1. Lokasi kegiatan PKM di Hutan Desa Dorari

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di tempat penyulingan minyak cengkeh, Kelurahan Dorari Isa Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, serta masyarakat Kelurahan Dorari Isa Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan yakni sosialisasi atau penyuluhan perhutanan sosial dari dosen kepada masyarakat, mahasiswa dan pengurus LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) serta KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) Garamakusu.

Penyuluhan perhutanan sosial merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar dapat mengelola sumber daya hutan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (KLHK, 2022)



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut yakni pemahaman terkait kebijakan perhutanan sosial yang ada di Kelurahan Dorari isa. Model perhutanan sosial yakni skema hutan desa. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan memakai sistem agroforestri. Kelurahan Dorari Isa, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara memiliki 4 (empat) KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yakni KUPS Liremabuku yang berfokus pada ekowisata, KUPS Makuriorio yang berfokus pada kerupuk dan selai nenas, KUPS Foma Kuaje berfokus pada kripik singkong, dan KUPS Garamakusu yang berfokus pada minyak cengkeh.

Kegiatan identifikasi tanaman diawali dengan pengenalan metode identifikasi serta mengenali jenis tanaman agroforestri yang dibudidayakan kelompok. Berdasarkan hasil identifikasi pada lahan yang dikelola terdapat beberapa jenis tanaman pertanian dan tanaman hutan yang ditanam dalam satu lahan yang sama dengan pola tanam *Random mixture* atau yang dikenal dengan sistem tanam campur. Agroforestri dianggap sebagai metode alternatif pengelolaan lahan dan merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan di Indonesia yang meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, agroforestri sering dipandang sebagai contoh sistem pengelolaan lahan berkelanjutan (Tamrin *et al.*, 2024).

Jenis tanaman yang budidayakan merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi diantaranya ubi kayu, pisang, cabe, serei wangi, mangga, nangka, alpukat, kelapa, cengkeh dan pala serta tanaman hutan yakni sengon, jabon dan lainnya. Pemilihan jenis-jenis tanaman tersebut berdasarkan fungsi dan juga memiliki nilai ekonomi (Tamrin & Kamaluddin, 2022).



Gambar 3. Indentifikasi tanaman agroforestri



Gambar 4. Pemasakan Minyak Cengkeh KUPS Baramakusu

Penyulingan minyak cengkeh merupakan salah satu kegiatan dari beberapa jenis kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Perhutanan Sosial (RKPS) KUPS Baramakusu yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Proses penyulingan dimulai dari pengumpulan daun cengkeh yang telah kering. Setelah dikumpulkan daun cengkeh tersebut disuling dengan menggunakan ketel berkapasitas 50 kg. Ketel tersebut berisi air secera penuh dan daun cengkeh seberat 20 kg dan selanjutnya dimasak dengan parapian yang stabil menggunakan serabut, tempurung kelapa serta kayu bakar dari percabangan dan ranting kayu kering sekitar kebun milik KTH. Setelah beberapa jam uap dari hasil penyulingan tersebut akan keluar dalam bentuk minyak bercampur air lalu dikumpulkan pada baskom kemudian didiamkan beberapa saat untuk memisahkan antara air dan minyak cengkeh. Total waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan penyulingan tersebut yakni 8 jam. Setelah minyak disaring kemudian di masukkan ke dalam botol kemasan berukuran 10ml.



Gambar 5. Pengemasan Produk Minyak Cengkeh

Hingga saat ini, produk yang dihasilkan kelompok perhutanan sosial Pulau Hiri masih dijual di berbagai platform baik media sosial Facebook atau Instagram milik kelompok perhutanan sosial dan juga melalui pusat oleh-oleh Ternate serta kantor KPH Ternate Tidore dengan harga Rp 50.000-, per botol dengan ukuran 10ml.

SIMPULAN

Hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber daya alam. Namun, laju deforestasi yang tinggi, terutama antara tahun 2010-2015, menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan hutan. Kebijakan perhutanan sosial yang diperkenalkan, seperti Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengelola hutan secara berkelanjutan, dan mengurangi konflik dalam penguasaan kawasan hutan. Di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kecamatan Pulau Hiri, implementasi perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, seperti dalam kegiatan penyulingan minyak cengkeh. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada pengurus LPHD Buku Manyeku, khususnya KUPS Garamakusu, Kelurahan Dorari Isa yang telah bekerjasama dengan baik, memberikan kesempatan kepada kami dalam kolaborasi dan pendampingan sehingga PKM dosen Bersama mahasiswa dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BPSKL, 2024. Laporan Capain Program Perhutanan Sosial Wilayah Maluku Papua Tahun 2024
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



<https://ppidklhk.com/berita/127-ha-kawasan-hutan-untuk-kegiatan-perhutanan-sosial>
[diunduh pada tanggal 10 mei 2025]

Maluku Utara, I. K. S. K. M., & Maluku, I. B. P. S. P. (2024). Maluku Utara dalam angka. Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press.

Tamrin, M., Kamaluddin, A.K., Nurdin, A.S. 2023. Optimalisasi Penggunaan Lahan dengan Pola Agroforestri di Kampus IV Dusun Bangko, Halmahera Barat. *Jurnal Kehutanan. Wahana Forestra*, 20(1), 88–94. DOI: 10.31849/forestra.v20i1.24240

Tamrin, M., Kamaluddin, A.K. (2022). *Jurnal Kehutanan (Agroforestry Management in The Utilization Block of KPH Bacan)*. *Jurnal Kehutanan. Wahana Forestra*, 17(2), 135–147.

Ternate, B. P. S. K. (2024). Kota Ternate dalam angka 2024. *BPS Kota Ternate. Ternate*.